

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

(Studi Pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi S1 Akuntansi

YOSHI FAZA NUR SHADRINA

NPM : C10160061



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

BANDUNG

2020

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

(Studi Pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)

YOSHI FAZA NUR SHADRINA

NPM : C10160061

Bandung, 31 Juli 2020

Pembimbing



Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi S1

Akuntansi

Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP

Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggung jawab yuridis ada pada peneliti

PERNYATAAN
PROGRAM SARJANA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan bimbingan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Yoshi Faza Nur Shadrina

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)

Oleh :

Yoshi Faza Nur Shadrina

Pembimbing :

Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang berbasis deskriptif data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Populasi sebanyak 3463 jiwa di Desa Sukamaju. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, sehingga jumlah sample didapatkan sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS Versi 22.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.

**THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND COMMUNITY
PARTICIPATION IN VILLAGE FUND MANAGEMENT ON COMMUNITY
EMPOWERMENT**

(Study on Sukamaju Village Cilawu Sub-district of Garut Regency)

Written by :

Yoshi Faza Nur Shadrina

Preceptor by :

Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the influence of accountability and community participation in village fund management on community empowerment. The independent variabel of this research is accountability and community participation, where the dependent variable of this research is the community empowerment.

The research method used is a quantitative method with descriptive data approach which use primary data that was collected by spreading questionnaires. The population of this research is 3463 soul in Sukamaju village. The samples of this research were generated by implementing probability sampling and the number of samples obtained as many as 100 respondents. The analysis methods adopted in this research is multiple linear analysis regressions that is supported by SPSS Software 22.0 Version.

The result of this research showed that partially accountability and community participation in village fund management have an effect on community empowerment. In addition, simultaneously it can be concluded that there is a influence of accountability and community participation in village fund management have on community empowerment.

Keywords : Accountability, Community Participation, Community Empowerment.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi isi, penulisan, maupun tata bahasanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan - hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dukungan, bimbingan, saran, doa serta motivasi yang sangat besar dari banyak pihak, penelitian skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis.
2. Kedua Orang Tua, khususnya untuk Alm Ayah Meransyah Noor dan Ibu Yuce Yuliantini serta kakak Yusha Nurhadyan, terimakasih atas semua do'a, kebaikan, kesabaran, motivasi serta dukungan baik dukungan moril maupun dukungan materil yang telah diberikan untuk penulis.

3. Bapak Prof. Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, SE.,M.Sc.,CSP, selaku ketua STIE EKUITAS.
4. Bapak Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. Selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS.
5. Ibu Dr. Neneng Hayati,. SE., MM. Selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS.
6. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT. Selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS.
7. Ibu Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE EKUITAS.
8. Bapak Bimbim Maghriby, SE., Ak., M.Ak., BKP. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi.
9. Ibu Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.,. Selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, pengetahuan dan pengalaman. Terimakasih karena Ibu selalu sabar untuk membimbing dan mendukung penulis hingga skripsi ini dapat selesai.
10. Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh karyawan STIE EKUITAS Bandung, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi.
11. Bapak Kadar Solihat selaku Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut yang telah menerima dan mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian di Desa Sukamaju.
12. Seluruh karyawan Kantor Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, terimakasih atas bantuannya dalam pelaksanaan penelitian ini.
13. Keluarga besar Noor Syamsu, para Uwa, Bibi, Paman, dan Sepupu,. Terimakasih atas do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

14. Sahabat seperjuangan Dhea Adelia, Dian Andayani, Reza Karlina, dan Annisa Rahmawanti yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Gilang Purnama yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a, waktu luang, serta tenaga untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah selalu menemani dan memberikan semangat dari awal hingga skripsi ini selesai.
16. Sahabat sahabat tercinta Elsa Nuzullah R, Mila Pratiwi, Isti Kamahsari, Vania Siagian, Isma Meitisyah, Salsabila Fitria, Fajar Ilyas, Davey Gusti, dan Septiana Wijaya yang selalu mendo'akan, memberi motivasi, dukungan dan waktu luang untuk penulis.
17. Teman-teman seangkatan Prodi S1 Akuntansi, khususnya kelas AK 2 yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
18. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan do'a restu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN	13
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.1.1 Keuangan Desa	13
2.1.2.1 Pengertian Desa	13
2.1.2.2 Pengertian Keuangan Desa	14
2.1.2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.1.2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 155	
2.1.2.5 Jenis APBDesa	15
2.1.2 Dana Desa	17
2.1.2.1 Pengertian Dana Desa	17
2.1.2.2 Tujuan Dana Desa	18
2.1.2.3 Tim Pengelola Dana Desa	18
2.1.3 Akuntabilitas	20
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	20
2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas	22
2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas	23

2.1.3.4	Indikator Akuntabilitas	23
2.1.4	Partisipasi Masyarakat	24
2.1.4.1	Pengertian Partisipasi Masyarakat	24
2.1.4.2	Unsur-Unsur Partisipasi Masyarakat	25
2.1.4.3	Manfaat Penerapan Partisipasi	26
2.1.4.4	Prinsip-prinsip Partisipasi	26
2.1.4.5	Macam-Macam Partisipasi	28
2.1.4.6	Indikator Partisipasi	28
2.1.5	Pemberdayaan Masyarakat	29
2.1.5.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	29
2.1.5.2	Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat	30
2.1.5.3	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	31
2.1.5.4	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	32
2.1.5.5	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	33
2.1.5.6	Upaya untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat	34
2.1.5.7	Indikator Pemberdayaan Masyarakat	34
2.2	Kerangka Pemikiran	35
2.3	Hipotesis	44
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN		45
3.1	Objek Penelitian	45
3.2	Metode Penelitian	45
3.2.1	Metode Yang Digunakan	45
3.2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian	46
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel	50
3.2.3.1	Populasi	50
3.2.3.2	Teknik Penentuan Sampel	50
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data	51
3.2.5	Rancangan Pengujian Hipotesis	52
3.2.5.1	Analisis Data	52
3.2.5.1.1	Uji Validitas	53
3.2.5.1.2	Uji Reliabilitas	54
3.2.5.1.3	Uji Asumsi Klasik	54
3.2.5.1.4	Analisi Regresi Linier Berganda	57
3.2.5.1.5	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	57

3.2.5.1.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	58
3.2.5.1.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	60
4.1.1 Karakteristik Responden	60
4.1.1.1 Responden Berdasarkan Usia	60
4.1.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
4.1.1.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan	62
4.1.2 Hasil Uji Validitas	63
4.1.3 Hasil Uji Realibilitas	66
4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	67
4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas	67
4.1.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
4.1.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda	71
4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	72
4.1.7 Pengujian Hipotesis	73
4.1.7.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	73
4.1.7.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	74
4.2 Hasil Penelitian	76
4.3 Pembahasan	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN – LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	47
Tabel 4. 1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	60
Tabel 4. 2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4. 3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	62
Tabel 4. 4	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	64
Tabel 4. 5	Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat.....	64
Tabel 4. 6	Hasil Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat.....	65
Tabel 4. 7	Hasil Uji Reabilitas Variabel Akuntabilitas.....	66
Tabel 4. 8	Hasil Uji Reabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat	67
Tabel 4. 9	Hasil Uji Reabilitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat	67
Tabel 4. 10	Hasil Uji Normalitas	68
Tabel 4. 11	Hasil Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4. 12	Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4. 13	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	71
Tabel 4. 14	Analisis Koefisien Determinasi <i>Adjusted R²</i>	73
Tabel 4. 15	Uji Statistik F	74
Tabel 4. 16	Uji Statistik t	74
Tabel 4. 17	Kriteria Presentase Skor Tanggapan Terhadap Skor Ideal	76
Tabel 4. 18	Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas	77
Tabel 4. 19	Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat	79

Tabel 4. 20 Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai

Pemberdayaan Masyarakat..... 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Anggaran Dana Desa (Dalam Triliun Rupiah).....	4
Gambar 2.1 Paradigma Penelitian.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Formulir Pengajuan Skripsi	101
Lampiran 2	Surat Permohonan Penelitian.....	102
Lampiran 3	Surat Keputusan Pembimbing	103
Lampiran 4	Kuesioner Penelitian.....	104
Lampiran 5	Jawaban Responden.....	108
Lampiran 6	Hasil Output SPSS.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan pada saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan tersebut yang menjadikan negara Indonesia sulit untuk menjadi negara maju. Meskipun setiap tahunnya jumlah kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan tetapi jumlah kemiskinan tersebut masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Di Indonesia tingkat kemiskinan dipedesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di perkotaan. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2019 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di pedesaan sebanyak 15,15 juta jiwa sedangkan tingkat kemiskinan di kota sebesar 9,99 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada beberapa faktor yang membantu penurunan tingkat kemiskinan yaitu :

1. Meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 0,93% dari enam bulan terakhir.
2. Indeks nilai tukar petani yang selalu berada di atas 100
3. Berkurangnya tingkat pengangguran
4. Inflasi umum yang cukup rendah dalam 6 bulan terakhir sebesar 1,52%
5. Pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) yang tepat waktu

Pembangunan di Indonesia merupakan cara untuk meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan. Pembangunan desa

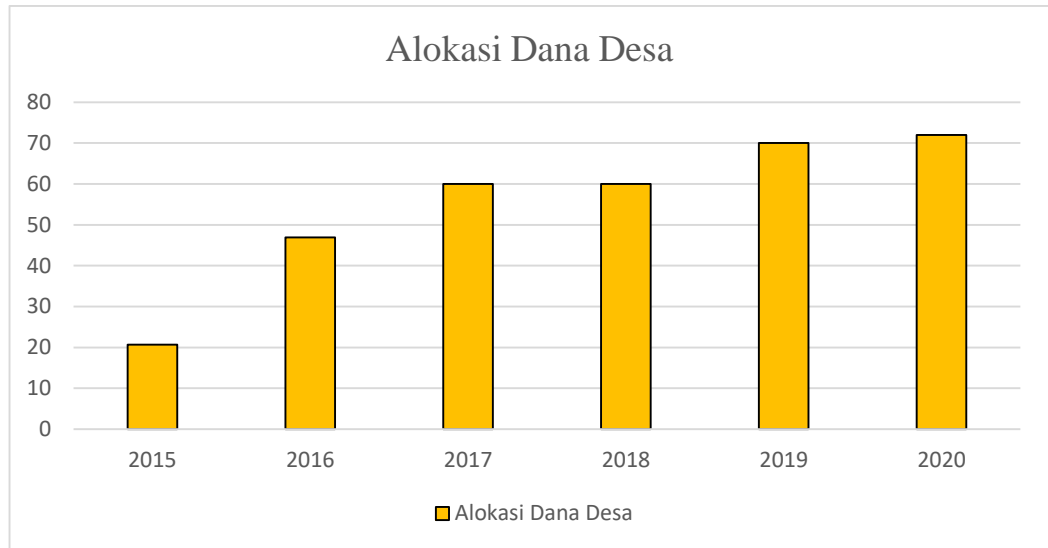
merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus warganya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Desa memiliki peran yang penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan, karena desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. Karena pada saat ini sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal dikawasan pedesaan, maka pembangunan desa merupakan priotas utama dalam kesuksesan pembangunan dan program-program pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan wilayah pedesaan terutama daerah yang masih tertinggal.

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2015 pemerintah Indonesia khususnya dalam kepemimpinan era Joko Widodo dan Jusuf Kalla membuat program nawacita yang dimana dalam program nawacita tersebut terdapat program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan dengan tujuan untuk terlaksananya pemerataan ekonomi yang berkeadilan

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>). Maka pada tahun 2015 pemerintah mulai mengalokasikan dana desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa dalam pasal 1 menyebutkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntungkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian dana desa ini diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

Sejak awal dialokasikannya dana desa, anggaran untuk dana desa tersebut selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi yang dirilis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) bahwasannya pada tahun 2015, anggaran untuk dana desa sebesar Rp. 20,7 Triliun, tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp. 46,9 Triliun, tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp. 60 Triliun. Pada tahun 2018 anggaran dana desa tidak mengalami kenaikan tetapi anggarannya sama seperti tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60 Triliun, tahun 2019 anggaran dana desa mengalami peningkatan lagi menjadi Rp. 70 Triliun, dan pada tahun 2020 anggaran dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp 72 Triliun. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-2015/>, diunduh pada tanggal 07 Januari 2019).



Gambar 1. 1 Anggaran Dana Desa (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber : Kementerian Keuangan

Pemberian dana desa ini memberikan dampak yang positif kepada masyarakat desa seperti terciptanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa, salah satu contohnya adalah tersedianya pembangunan jalan desa, adanya penyediaan pos kesehatan di desa, dan sebagainya. Selain terdapat dampak positif pemberian dana desa juga membawa permasalahan serta tantangan yang menjadi pokok permasalahan serius dalam pengelolaan dana desa. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa dan kepala desa masalah ini muncul karena pengelolaan dana desa tidak diiringi dengan adanya kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga 2018 kasus korupsi dana desa setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 kasus korupsi dana desa sebanyak 22 kasus, tahun 2016 meningkat menjadi 48 kasus, tahun 2017 meningkat cukup tinggi yaitu menjadi 98 kasus korupsi dana desa, sedangkan pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan

dari 98 menjadi 96 kasus korupsi. Korupsi dana desa selama 2015 – 2018 mencapai 252 kasus, dengan total kerugian Negara mencapai Rp. 107,7 Miliar. Kasus korupsi ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, dan penggelembungan anggaran.

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>, diunduh pada tanggal 17 November 2019).

Permasalahan kasus korupsi tersebut juga terjadi di Kabupaten Garut. Kasus tersebut berupa penggelapan dana desa sebesar Rp 414 Juta, yang dilakukan dengan membuat kegiatan fiktif. Pelaku memberi kesaksian bahwa penggelapan dana desa yang dilakukan juga berasal dari dana desa untuk kegiatan jalan lingkungan desa dan anggaran untuk pembangunan desa. Dalam kasus tersebut pelaku yang merupakan kepala desa ditetapkan sebagai tersangka dan harus membayar sebagian nominal yang sudah berhasil dikorupsi. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/tilep-dana-desa-rp-414-juta-kades-di-garut-jadi-tersangka.html>, diunduh pada tanggal 25 Oktober 2019). Dengan banyaknya kasus korupsi dana desa yang terjadi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa kasus korupsi dana desa bias terjadi karena kurangnya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dalam alokasi dana desa dinilai masih lemah sehingga membuka potensi untuk dilakukannya korupsi, untuk mengurangi kasus korupsi dana desa pemerintah harus lebih memperhatikan fungsi pengawasan dan melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain hal tersebut untuk mengurangi kasus korupsi pemerintah harus lebih memperhatikan kemampuan kepala desa dalam hal mengelola anggaran hingga membuat laporan pertanggung jawaban

<https://tirto.id/kasus-dana-desa-fiktif-merupakan-tanggung-jawab-pemerintah-elk5>, diunduh pada tanggal 8 November 2019).

Dari fenomena tersebut dapat terlihat bahwa pengelolaan dana desa di Indonesia masih belum dikelola dengan baik dan belum memenuhi asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas tersebut dirumuskan dengan tujuan agar kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Dengan adanya asas pengelolaan keuangan desa tersebut peneliti mengambil asas pengelolaan keuangan desa untuk dijadikan variabel yang akan dihubungkan dengan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya (SAP,2019). Transparansi dilakukan untuk memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan beserta sumber daya yang digunakan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (SAP,2019). Akuntabilitas dilakukan sebagai upaya pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan

adanya kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik karena tidak mementingkan kepentingan publik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di balai desa. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa. Tetapi saat ini masih banyak desa yang belum melakukan kegiatan tersebut, padahal pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran merupakan sebuah keharusan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa sebagai upaya dalam melaksanakan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat (<https://beritakini.co/news/banyak-desa-di-agara-belum-pasang-baliho-realisasi-add-2018/index.html>, diunduh pada tanggal 26 Agustus 2018).

Partisipasi adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (Mardiasmo,2002). Menurut Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa kurangnya ikut serta peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa, padahal peran masyarakat merupakan hal yang penting karena dengan hal itu masyarakat bisa mengetahui pengelolaan dana desa yang akan disalurkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut

Pemendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tertib dan disiplin anggaran memiliki pengertian bahwa anggaran harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintahan desa karena pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan dalam adanya dana desa. Dengan adanya masyarakat yang berdaya diharapkan akan meningkatkan pendapatan desa yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam pencegahan terjadinya kasus korupsi di desa, karena dengan adanya masyarakat yang berdaya masyarakat diharapkan dapat terlibat didalam proses perencanaan hingga proses pengelolaan dana desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan bisa mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan masyarakat diikutsertakan dalam pengawasan bagaimana dana desa diimplementasikan

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/17/19233171/cegah-korupsi-di-sektor-desa-icw-tekanan-pemberdayaan-masyarakat>, diunduh pada tanggal 17 Desember 2020). Dengan adanya dana desa untuk pemberdayaan masyarakat ini diharapkan masyarakat dapat menerima bantuan yang nantinya dapat memandirikan masyarakat tersebut, maka dari itu pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan tanggungjawab dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan

dana desa agar tidak terjadinya kasus korupsi dana desa yang bisa menghambat terjadinya pemberdayaan masyarakat.

Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu merupakan desa yang berada di Kabupaten Garut. Desa Sukamaju belum sepenuhnya mengalokasikan dana desa dengan baik karena masih adanya perencanaan pembangunan desa yang belum terlaksana, salah satu contoh pembangunan yang belum terlaksana yaitu adanya pembangunan jalan dan pembangunan pos posyandu.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang telah diuraikan, yang dimana menunjukkan masih belum terlaksananya dengan baik asas pengelolaan keuangan desa khususnya asas akuntabilitas dan partisipasi masyarakat maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ?

2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Sukamaju secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Sukamaju secara simultan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada program Studi Akuntansi STIE EKUITAS. Disamping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Sukamaju.
2. Untuk menggambarkan pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara parsial terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Sukamaju.

3. Untuk menggambarkan pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara simultan terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Sukamaju.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya mengenai pengelolaan dana desa dan juga sebagai syarat untuk mendapat gelar Strata 1.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi untuk pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mengadakan penelitian adalah Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April 2020 sampai dengan selesai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Keuangan Desa

2.1.2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan desa dan kepala desa adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sehingga, desa diberikan kepercayaan secara mandiri untuk mengelola keuangannya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat dimana mereka memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dimana desa ini dipimpin oleh kepala desa.

2.1.2.2 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dilihat dari sifat pengelolaannya keuangan desa dibagi menjadi dua, yaitu keuangan desa yang bersifat langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

2.1.2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif, dan
4. Dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disering disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa merupakan dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa yang didalamnya memuat tentang belanja untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang ditetapkan selama satu periode. Selain itu, APBDesa juga memuat tentang sumber pendapatan yang diharapkan dapat digunakan untuk menutup rincian belanja tersebut, maupun untuk menutup pembiayaan yang diperlukan apabila suatu saat terjadi kekurangan anggaran.

2.1.2.5 Jenis APBDesa

Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa dalam Bab III pasal 9 menyebutkan bahwa APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, yang merupakan pendapatan dari perolehan potensi pendapatan yang ada didesa seperti : hasil usaha bagi hasil dengan BUMDesa, hasil asset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain.

- b. Transfer, yang terdiri dari : dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pendapatan Lain, yang terdiri dari : pendapatan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

Belanja desa dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pembiayaan desa dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa ini terdiri menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana desa disetiap desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot :

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten atau kota.
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten atau kota.
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten atau kota.

Dana desa dialokasikan dalam bentuk transfer bukan dalam bentuk proyek. Dana desa diadakan sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa dalam bentuk transfer yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan pemberian dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.2.2 Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari diadakannya dana desa yaitu untuk :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

2.1.2.3 Tim Pengelola Dana Desa

Dalam pelaksanaan dana desa dibentuk sebuah tim, tim tersebut dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten,

pendampingan di tingkat Kecamatan dan pelaksanaan di tingkat Desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Dana Desa. (Ultafiah:2017)

a. Tingkat Kabupaten

Tugas yang dilakukan oleh Tim fasilitasi tingkat Kabupaten yaitu :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi atau penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang dana desa.
2. Menentukan desa penerima dana desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring atau pengendalian dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan dana desa.
4. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
5. Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati.

b. Tingkat Kecamatan

Tim pendamping dana desa di tingkat Kecamatan dibentuk dengan keputusan Bupati yang terdiri dari :

1. Camat sebagai penanggung jawab
2. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua
3. Kasi Tata Pemerintahan sebagai sekretaris
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota, dan

5. Staf seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota

c. Tingkat Desa

Tim pelaksanaan tingkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab kegiatan
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi,2015:9)

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan

proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya (Kusumastuti,2014:2)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (*principal*) (Mahmudi,2016:19)

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk perencanaan hingga pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, yang dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang-undangan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, atau kebijakan lain yang telah ditetapkan. Dan dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi oleh masyarakat.

2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Berikut ini beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik yaitu (Mahmudi,2015:10)

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
(*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas.

5. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu (Adisasmita:2011) :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.3.4 Indikator Akuntabilitas

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 27, indikator yang harus diterapkan oleh kepala desa selaku pengelola dana desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
- b. Adanya laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- c. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. Adanya atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
- c. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
- d. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah bentuk peran serta dan/atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan secara pro aktif (Solekhan:2012). Adisasmita menjelaskan bahwa partisipasi

masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang dikerjakan oleh masyarakat lokal.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan (Dewi,dkk,2013). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan,2012:20).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa, karena tanpa adanya pasrtisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.

2.1.4.2 Unsur-Unsur Partisipasi Masyarakat

Terdapat lima unsur dalam partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut (Solekhan,2014:144) :

1. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun sisi non fisik.
2. Adanya sikap pro aktif.

3. Kesadaran secara sukarela.
4. Adanya kesepakatan-kesepakatan.
5. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.

2.1.4.3 Manfaat Penerapan Partisipasi

Terdapat beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi, diantaranya sebagai berikut (Solekhan,2014:144) :

1. Keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
2. Proses partisipasi berpotensi menjadi media komunikasi yang bisa mengurangi adanya konflik dengan syarat forum dikelola sebagai forum deliberatif.
3. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.

2.1.4.4 Prinsip-prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* adalah (Sumampouw:2004) :

a. Cakupan

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*)

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

c. Transparansi

Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

d. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*)

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*)

Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing Power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g. Kerjasama

Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.1.4.5 Macam-Macam Partisipasi

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain (Solekhan, 2012:33)

1. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternative dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.

2.1.4.6 Indikator Partisipasi

Berdasarkan beberapa pengertian dan juga unsur partisipasi masyarakat, maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi (Ardiyanti:2019) :

- a. Adanya pengawasan dari masyarakat.
- b. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.

c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.

d. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

2.1.5 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya (Asisasma, 2010:132). Pemberdayaan dilakukan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti) kemampuan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan (Wardikanto, 2013:61).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut (Atshil:2017). Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai konsep pembangunan yang memberikan manfaat nyata dan positif

terhadap kinerja pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1 Bab 1 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan atau memperkuat masyarakat yang dalam kondisi lemah dan tidak mampu melepaskan diri dari keterbelakangan sehingga menjadi berdaya melalui serangkaian kegiatan baik melalui motivasi, peningkatan pengetahuan, dan menggali kemampuan yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memampukan dan memandirikan masyarakat sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.5.2 Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2015:222) mengungkapkan bahwa salah satu unsur yang memegang peran penting dalam organisasi adalah manusia. Sehingga, lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Bina Manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya meliputi pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas entitas, dan pengembangan kapasitas sistem.

2. Bina Usaha

Merupakan upaya yang memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan.

3. Bina Lingkungan

Merupakan upaya yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang masyarakat melalui penjagaan lingkungan hidup untuk lebih baik.

4. Bina Kelembagaan

Menurut Mosher (1969) menyatakan bahwa untuk membangun struktur perdesaan yang progresif dibutuhkan beberapa kelembagaan, yaitu sarana produksi dan peralatan pertanian, kredit produksi, pemasaran produksi, percobaan atau pengujian lokal, penyuluhan, dan transportasi.

2.1.5.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sumaryadi (2005) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, kaum

kecil, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, baik mandiri dalam kemampuan berpikir, bertindak, maupun dalam pengendalian hal-hal apapun yang mereka inginkan. Kemandirian ini dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi mereka, dalam kegiatan sosial sehari-hari, dan dalam kegiatan politik kemasyarakatan.

2.1.5.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi dengan memberi motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap tersebut adalah (Padangaran, 2011:31-32) :

1. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*) atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan,

keterampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.

3. Tahap pemberdayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

2.1.5.5 Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat lima aspek penting yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, dan pembangunan dan pengembangan jejaring. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tiga sisi, yaitu (Mardikanto dan Soebianto,2015:224) :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*). Artinya adalah pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan upaya sederhana yang dapat dilakukan, seperti pemberian dorongan, pemberian motivasi yang akan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat tersebut maupun potensi yang berada dilingkungan masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat akan berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Setelah suasana atau iklim berkembang di

lingkungan masyarakat, maka penguatan potensi nyata tersebut harus dilakukan, seperti penyediaan masukan (*input*), maupun pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi mempunyai arti sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan juga eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sehingga, pemberdayaan masyarakat bukan mempunyai tujuan agar masyarakat menjadi ketergantungan terhadap berbagai program pemberian (*charity*).

2.1.5.6 Upaya untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut (Mardikanto dan Soebianto,2015:226) :

- a. Meningkatkan semangat aktivitas masyarakat.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator.
- c. Membangun komitmen untuk memperoleh dukungan kebijakan, sosial, dan finansial dari berbagai pihak terkait.
- d. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

2.1.5.7 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa meliputi (Cornelius dan Purnomo dalam Sumodiningrat:2016) :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin

- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok
- e. Meningkatnya kapasitas dan pemerataan pendapatan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa selaku pengelola dana desa dan selaku pelaku administrasi kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penggunaan dana desa tersebut. Pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggungjawab karena hal tersebut mengacu pada tujuan diadakannya dana desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan terlaksananya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang dilakukan dalam rangka memampukan dan memandirikan masyarakat dengan potensi sumber daya yang dimiliki, jika pengelolaan dana desa ini dilaksanakan dengan baik, tanggungjawab, dan berfokus pada kepentingan publik maka

masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana tersebut yang dapat digunakan untuk mengelola sumber daya yang mereka miliki.

Adapun indikator pada akuntabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran

Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran merupakan salah satu indikator yang ada didalam penelitian ini, dengan adanya indikator ini diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik serta bertanggungjawab untuk kepentingan publik karena adanya tujuan dalam satu tahun anggaran yang harus tercapai. Yang dimana tujuan dalam pengelolaan dana desa ini salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini merupakan upaya dalam memandirikan dan memampukan masyarakat. Disini masyarakat diharapkan dapat melakukan perubahan melalui pemanfaatan potensi kelebihan yang dimiliki oleh desa yang dibiayai atau yang berasal dari dana desa.

2. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ini diharapkan pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang dimana nantinya masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban dengan mudah. Dengan adanya laporan

pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan dana desa ini maka pemberdayaan masyarakat ini bisa tercapai.

3. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa

Dengan adanya keterlibatan pemerintah desa ini diharapkan dapat membuat pengelolaan dana desa dikelola dengan baik dengan fokus utama untuk mementingkan kepentingan publik yang nantinya agar bisa membuat masyarakat mampu dan mandiri dalam hal melakukan perubahan. Jika pemerintah desa ikut terlibat didalam pengelolaan dana desa maka masyarakat akan merasakan manfaat dari dana desa tersebut sehingga pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana karena adanya kemampuan masyarakat dalam melakukan perubahan.

4. Adanya pengawasan dari tim pelaksana

Dengan adanya pengawasan dari tim pelaksana dalam pengelolaan dana desa diharapkan pengelolaan dana desa ini dikelola dengan baik dan berfokus pada kepentingan publik agar tujuan utama dari adanya dana desa yaitu terciptanya pemberdayaan masyarakat dapat terlaksanakan karena dengan tercapainya pemberdayaan masyarakat ini akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jika pengelolaan dana desa dilakukan pengawasan oleh tim pelaksana maka tidak akan adanya kecurangan atau kasus dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Rina Indrawati Syafi'I dkk pada tahun 2018 dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap

pemberdayaan masyarakat. Menurut Weny Ultrafiah (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Menurut Rizky Amalia Sugista (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel akuntabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Menurut Fitri Sukmawati (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Maka dari itu berdasarkan pemikiran dan penelitian yang ada sebelumnya, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis :

H1 : Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

2.2.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa disini adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa yang bisa dilakukan dari mulai perencanaan hingga pengawasan, selain itu keterlibatan masyarakat disini juga diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat ini diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dengan adanya dana desa ini bisa tercapai yaitu salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini diharapkan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud karena dengan

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa ini masyarakat bisa merasakan manfaat dengan adanya dana desa yang bisa digunakan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Partisipasi masyarakat dalam hal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan karena masyarakat mempunyai peran sebagai bentuk kemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang dimulai dari perencanaan, diharapkan kebutuhan-kebutuhan dan juga ide masyarakat dapat tersalurkan dan dipenuhi dengan baik.

Adapun indikator pada partisipasi masyarakat yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Adanya Pengawasan dari Masyarakat

Dengan adanya indikator ini dalam pengelolaan dana desa diharapkan masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, masyarakat dapat mengawasi secara langsung bagaimana pengelolaan dana desa dilaksanakan dan masyarakat diberi kebebasan dalam melaksanakan pengawasan ini. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat maka pengelolaan dana desa dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan dari alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Penerimaan Manfaat Program Pemberdayaan Masyarakat dari Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa indikator keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat yang

sudah ditetapkan dalam pengalokasian dana desa sangat diperlukan karena masyarakat diharapkan dapat menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang merupakan salah satu cara dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti contohnya masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pertanian yang dibantu dengan dana desa dalam pembelian pupuk dan benih tanaman, karena Indonesia merupakan Negara agraris maka terdapat banyak sektor pertanian sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan menciptakan tanaman hidroponik yang nantinya hal ini akan menciptakan pemberdayaan masyarakat karena masyarakat mampu memandirikan dan membuat perubahan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa indikator ini dibutuhkan karena masyarakat harus ikut serta dan mengetahui bagaimana perencanaan dalam pengelolaan dana desa, karena dengan keterlibatan masyarakat ini mereka bisa mengetahui bagaimana dana desa ini dikelola dalam upaya perencanaan pembangunan yang nantinya akan memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Seperti contohnya dana desa ini digunakan dalam perencanaan pembangunan posko kesehatan yang nantinya masyarakat desa dapat melakukan pengecekan kesehatan dengan memanfaatkan kelebihan yang ada.

4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat ini pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya dalam alokasi dana desa bisa tercapai sehingga nantinya akan menciptakan pemberdayaan masyarakat. Karena jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan ini bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Menurut I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi pada tahun 2019 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat apabila pengelolaan dana desa dikelola dengan berhasil dan baik maka pemberdayaan masyarakat pun bisa terlaksana. Menurut Ribka Lombogia, Joorie M. Ruru, Novva N. Plangiten (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan pembangunan didesa, pembangunan desa merupakan salah satu upaya adanya pemberdayaan masyarakat. Menurut I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektifitas pengelolaan dana desa. Menurut Ray Septianis Kartika (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat ikut berkontribusi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Maka dari itu berdasarkan pemikiran dan penelitian yang ada sebelumnya, dalam penelitian ini diperoleh hipotesis :

H2 : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

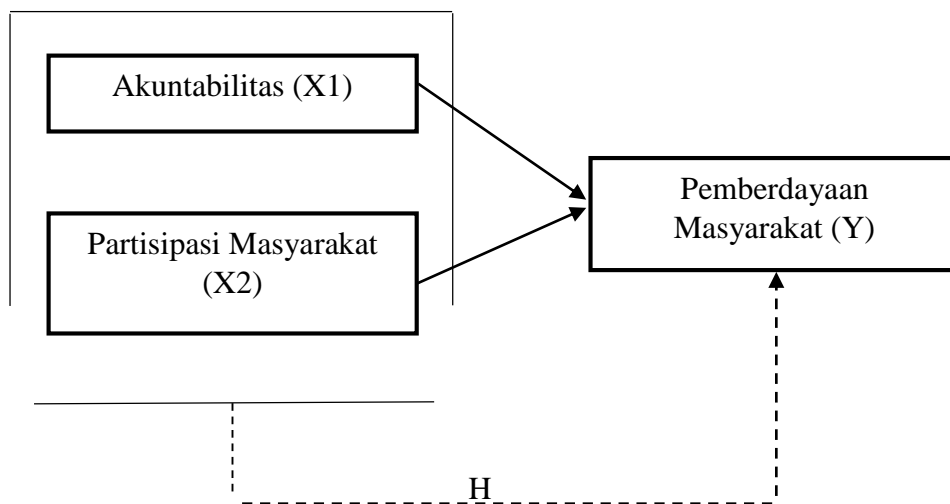
2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa disini yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan anggaran dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan berfokus kepada kepentingan publik dan dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa disini yaitu masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan anggaran dana desa ini, masyarakat harus ikut serta dalam proses pembangunan yang menggunakan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, selain itu masyarakat juga harus terlibat didalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa jika dilakukan dengan baik maka akan membantu dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini berarti masyarakat sudah mampu dan mandiri dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki desa tersebut sehingga terjadi pembangunan yang baik dan menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya tanggungjawab yang dilakukan pemerintah dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa maka akan meminimalisir adanya

kecurangan sehingga pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan dengan adanya dana desa ini bisa tercapai.

Rika Ardiyanti pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa variabel akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut Erni Tahir (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut Aditya Achmad Fathony dan Asep Sopian (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa alokasi dana desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Menurut Angriani Djaini (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Keterangan :

- > : Parsial
- - - - -> : Simultan

2.3 Hipotesis

Berdasarkan berbagai kajian asumsi dan penjabaran dalam kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat
- H2 : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat
- H3 : Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal atau variabel tertentu (Sugiyono,2017:41).

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul penelitian yaitu, Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu Akuntabilitas (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2), terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Penelitian dilaksanakan di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Yang Digunakan

Metode penelitian merupakan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif yang berbasis deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:35-36) pengertian metode kuantitatif adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Pemilihan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka, yang akan dianalisis menggunakan data statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan pada bab 2. Selain itu penelitian yang berbasis kuantitatif ini juga dilaksanakan untuk menguji teori atau dugaan sementara dalam penelitian apakah benar atau tidak (Sarmanu,2017:2).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian dalam konsep dimensi dan indikator. Disamping itu, tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mengidentifikasi variabel penelitian dan menghindari adanya perbedaan persepsi dalam penelitian. Operasionalisasi variabel penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Pengukuran
Akuntabilitas (X1)	<p>Pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi,2015:9)</p>	<p>a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.</p> <p>b. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.</p> <p>c. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>d. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.</p> <p>(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27.</p>	Skala Likert

Partisipasi Masyarakat (X2)	Bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan,2012:20)	a. Adanya pengawasan dari masyarakat. b. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa. c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa. d. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa (Rika Ardiyanti:2019)	Skala Likert
-----------------------------	---	--	--------------

<p>Pemberdayaan Masyarakat (Y)</p>	<p>Kegiatan untuk memperkuat kemampuan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan (Toto Wardikanto:2013)</p>	<p>a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin. c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya d. Meningkatnya kemandirian kelompok e. Meningkatnya kapasitas dan pemerataan pendapatan (Cornelius dan Daru Purnomo dalam Sumodiningrat:2016)</p>	<p>Skala Likert</p>
------------------------------------	--	--	---------------------

3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpilannya (Sugiyono,2017:136).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukamaju yang telah memiliki hak suara atau telah berumur 17 tahun. Jumlah penduduk desa sukamaju yang telah memiliki hak suara atau telah berumur 17 tahun adalah sebanyak 3463 jiwa.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2017:137). Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian. Untuk menentukan besarnya sampel dapat dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2018:164) berpendapat bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila sampel dibagi dalam kategori jumlah sampel harus sesuai dengan ukuran sampel tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk menentukan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Slovin, yaitu dengan menggunakan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) diasumsikan sebesar 10%

Maka perhitungan sampel nya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{3463}{1 + 3463 (0,1)^2}$$

$n = 97,19$ dibulatkan menjadi 100

Perhitungan jumlah sample tersebut menggunakan standar error sebanyak 10%, penentuan standar error tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah populasi yang akan diteliti. Selain itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan sample dengan metode ini karena terbatasnya tenaga dan juga terbatasnya waktu yang tidak memungkinkan pengambilan data secara keseluruhan, karena populasi dari penelitian ini sangat banyak. Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 100 responden, yang menjadi kriteria dasar dalam pengambilan responden ini adalah masyarakat desa yang telah memiliki hak suara atau telah berumur 17 tahun.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:223) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, sumber dan cara. Dalam penelitian ini sumber data penelitian adalah data primer, maka Sugiyono menambahkan teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan

dengan *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam memperoleh data primer yang diinginkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner (angket). Teknik ini dilaksanakan dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan menyertakan beberapa alternatif jawaban. Proses pengambilan data ini dilakukan penulis dengan membuat daftar pertanyaan maupun pernyataan yang kemudian diberikan kepada responden untuk dijawab dengan menggunakan alternative jawaban yang telah disediakan.

Kuesioner tersebut disebarkan untuk diisi oleh responden yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sukamaju yang telah mempunyai hak pilih dan telah berumur 17 tahun, dengan cara terjun langsung ke desa tersebut dan menemui responden secara langsung. Setelah data telah didapatkan, selanjutnya akan dilaksanakan pengujian validitas, pengujian realibilitas, maupun uji analisis data.

3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan *software* aplikasi SPSS. Tujuan analisis deskriptif dengan menggunakan statistika ini adalah untuk menginterpretasikan argumen responden terhadap pilihan

pernyataan dan distribusi frekuensi dari pernyataan responden berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian ini, jawaban responden diklasifikasikan dalam bentuk jawaban dengan menggunakan skala Interval dengan metode skala Likert. Kemudian dari jawaban tersebut yang akan mendeskripsikan atau memberikan gambaran variabel penelitian dan karakteristik responden yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan sebagainya. Berikut tahapan yang akan digunakan untuk menganalisis data tersebut.

3.2.5.1.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono,2017:125). Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.

Kuesioner dapat dikatakan sah atau valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan melakukan korelasi Item *Correlation* dengan melihat hasil perhitungan pada kolom *Corrected Item – Total Correlation*. Hal ini sama dengan perhitungan menggunakan korelasi *bivariate*, karena keduanya menghitung hal yang sama (Ghozali,2013:14). Dalam uji validitas ini, apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel, maka hasil tersebut telah valid.

3.2.5.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah proses olah data yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran data tetap konsisten (Siregar,2013:55). Dalam pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dinyatakan *reliable* apabila dua data atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila di pecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukur yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono,2010:456).

Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Secara umum, instrument penelitian dikatakan *reliable* jika mempunyai koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Jika nilai *Cronbach's Alpha* yang didapat dari masing-masing variabel adalah $> 0,6$ maka variabel-variabel tersebut dikatakan *reliable* (Ghozali,2013:50).

3.2.5.1.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Pandoyono dan Sofyan (2018:222) mengemukakan bahwa “Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji, apakah

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak”.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hal tersebut penting karena bila data setiap variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan statistik parametik (Sugiyono,2012:173). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik.

Untuk melihat normalitas residual, analisis grafik ini dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Sedangkan analisis statistiknya menggunakan *One Sample Kolmogorof-Smirnov Test*. Normalitas suatu data dapat dilihat jika data terdistribusi dengan normal, yaitu dengan melihat angka *differences* dan juga angka signifikannya. Jika angka signifikannya lebih dari 5% maka model tersebut dikatakan telah normal (Ghozali,2013:160)

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat

problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. Jika terbukti ada multikolonieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Santoso,2012:234).

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor (VIF)*. Semakin kecil nilai dari *tolerance* dan semakin besar nilai dari VIF, maka variabel tersebut semakin mendekati multikolonieritas. Dasar dari pelaksanaan uji ini adalah jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka variabel independen dalam model regresi tersebut tidak mengandung multikolonieritas (Ghozali,2013:108).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik *scatter plot*, dapat dianalisis jika terdapat pola yang jelas dan teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas dan tidak teratur maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas(Ghozali,2013:139).

3.2.5.1.4 Analisa Regresi Linier Berganda

Menurut Sekaran dan Bougie (2017:139) Analisis regresi linier berganda adalah teknik multivariate yang sering digunakan dalam penelitian bisnis, menggunakan lebih dari satu variabel bebas untuk menjelaskan varians dalam variabel terikat. Poin awal dari analisis regresi berganda adalah model konseptual yang sudah dibuat oleh peneliti pada tahap sebelumnya dari proses penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel. Persamaan regresi linier berganda mengacu kepada Sugiyono (2017:313) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pemberdayaan Masyarakat

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Partisipasi Masyarakat

ε = Tingkat Kesalahan

3.2.5.1.5 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Menurut Vando Fercanza dkk dalam jurnalnya (2016:8) Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan variabel independen atau variabel bebas untuk memberikan kontribusi dalam mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat kedalam bentuk presentase. Jika analisis

yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Tetapi, jika analisis yang digunakannya adalah regresi linier berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Hasil perhitungan *R Square* dapat dilihat pada *output model summary*. Pada kolom *R Square* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. (Ultafiah,2017:62)

3.2.5.1.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang masuk ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan uji ini adalah dengan menggunakan nilai F dan dengan nilai signifikansi sebesar 5%, maka model regresi tersebut ditolak dan tidak dapat digunakan. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.

3.2.5.1.7 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2013:99) uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menggunakan signfikan bernilai 5%

(0,05). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut yang telah memiliki hak suara atau telah berumur 17 tahun. Populasi dalam penelitian ini adalah 3463 jiwa. Kemudian diambil sample menggunakan metode Slovin yang didapatkan sebanyak 100 responden.

4.1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti kepada masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, maka penjelasan dari karakteristik responden tersebut adalah :

4.1.1.1 Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok responden berdasarkan usia sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tingkat Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase
17 – 30	25	25%

31 – 45	42	42%
45 - 60	28	28%
>60	5	5%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa untuk usia responden dari usia 17 – 30 tahun yaitu sebanyak 25 responden atau 25%. Kemudian usia responden yang paling banyak terdapat di usia antara 31-45 tahun yaitu sebanyak 42 responden atau 42%. Sedangkan usia responden antara 45-60 tahun yaitu sebanyak 28 responden atau 28%, dan usia diatas 60 tahun sebanyak 5 responden atau 5%. Dalam penelitian ini, kelompok responden berdasarkan usia yang dikatakan produktif telah menjawab pernyataan dalam kuesioner ini, yaitu dengan usia yang berkisar antara 17 tahun sampai dengan 60 tahun, yaitu usia sebelum memasuki masa pension. Dengan usia yang produktif tersebut, responden dapat menjawab dengan tepat isi dari kuesioner yang telah dibagikan.

4.1.1.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	59	59%
Perempuan	41	41%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 100 responden dalam penelitian ini, terdapat responden laki-laki sebanyak 59 orang, dan responden perempuan sebanyak 41 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut kebanyakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

4.1.1.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase
PNS	1	1%
Petani	47	47%
Wiraswasta	15	15%
Ibu Rumah Tangga	35	35%

Mahasiswa	2	2%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 orang, petani sebanyak 47 orang, wiraswasta sebanyak 15 orang, sebagai ibu rumah tangga sebanyak 35 orang, dan 2 orang responden lainnya adalah mahasiswa. Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah petani, karena penduduk Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut mayoritas mempunyai mata pencahariaan sebagai petani.

4.1.2 Hasil Uji Validitas

Setelah mendapatkan data dari hasil kuesioner, selanjutnya dilakukan uji validitas ini untuk mengetahui apakah pernyataan dalam kuesioner tersebut valid atau tidak. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas data ini adalah :

1. Apabila r hitung $>$ r tabel dengan *degree of freedom* (df) adalah n (jumlah sampel) $- 2$, maka item kuesioner tersebut dinyatakan valid.
2. Apabila r hitung $<$ r tabel dengan *degree of freedom* (df) adalah $n - 2$, maka item kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.

Dalam pengujian validitas dipenelitian ini, H_0 adalah pernyataan yang telah valid. Oleh karena itu, H_0 diterima jika r hitung $>$ r tabel. Df dihitung dengan $df = 100 - 2 = 98$. Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Sehingga r tabel = (98;0,05) = 0,165.

Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini

:

Tabel 4. 4
Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

	A.1	A.2	A.3	A.4	TOTAL
A.1 Pearson Correlation	1	.529**	.307**	.299**	.790**
Sig. (2-tailed)		.000	.002	.002	.000
N	100	100	100	100	100
A.2 Pearson Correlation	.529**	1	.298**	-.109	.851**
Sig. (2-tailed)	.000		.003	.280	.000
N	100	100	100	100	100
A.3 Pearson Correlation	.307**	.298**	1	-.020	.574**
Sig. (2-tailed)	.002	.003		.843	.000
N	100	100	100	100	100
A.4 Pearson Correlation	.299**	-.109	-.020	1	.247*
Sig. (2-tailed)	.002	.280	.843		.013
N	100	100	100	100	100
TO Pearson Correlation	.790**	.851**	.574**	.247*	1
TAL Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.013	
N	100	100	100	100	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada variabel akuntabilitas pada masing-masing item pernyataan didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,165. **Oleh karena itu, masing-masing pernyataan dalam variabel ini dinyatakan valid.**

Tabel 4. 5
Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

	PM.1	PM.2	PM.3	PM.4	PM.5	TOTAL
PM.1 Pearson Correlation	1	.033	.127	-.006	.013	.538**
Sig. (2-tailed)		.743	.207	.955	.897	.000

N		100	100	100	100	100	100
PM.2	Pearson Correlation	.033	1	-.158	.111	.055	.544**
	Sig. (2-tailed)	.743		.116	.272	.584	.000
N		100	100	100	100	100	100
PM.3	Pearson Correlation	.127	-.158	1	.154	.062	.444**
	Sig. (2-tailed)	.207	.116		.126	.540	.000
N		100	100	100	100	100	100
PM.4	Pearson Correlation	-.006	.111	.154	1	.006	.338**
	Sig. (2-tailed)	.955	.272	.126		.950	.001
N		100	100	100	100	100	100
PM.5	Pearson Correlation	.013	.055	.062	.006	1	.478**
	Sig. (2-tailed)	.897	.584	.540	.950		.000
N		100	100	100	100	100	100
TOT	Pearson Correlation	.538**	.544**	.444**	.338**	.478**	1
AL	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	
N		100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan yang ada didalam variabel partisipasi masyarakat didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan lebih positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,165. **Oleh karena itu, masing-masing pernyataan dalam variabel partisipasi masyarakat ini dinyatakan valid.**

Tabel 4. 6
Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	-.102	.384**	-.084	.124	.175
	Sig. (2-tailed)		.312	.000	.408	.218	.082
N		100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	-.102	1	.579**	.592**	.135	.709**
	Sig. (2-tailed)	.312		.000	.000	.180	.000
N		100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.384**	.579**	1	.552**	.323**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
N		100	100	100	100	100	100

Y.4	Pearson Correlation	-.084	.592**	.552**	1	.403**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.408	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.124	.135	.323**	.403**	1	.597**
	Sig. (2-tailed)	.218	.180	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.175	.709**	.797**	.889**	.597**	1
	Sig. (2-tailed)	.082	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa setiap pernyataan yang ada didalam variabel pemberdayaan masyarakat didapatkan nilai r hitung yang lebih besar dan lebih positif dibandingkan dengan nilai r tabelnya yang sebesar 0,165. **Oleh karena itu, masing-masing pernyataan dalam variabel pemberdayaan masyarakat ini dinyatakan valid.**

4.1.3 Hasil Uji Realibilitas

Uji realibilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pernyataan yang telah disusun oleh peneliti *reliable* atau tidak. Dalam pengujian ini menggunakan alat pengukuran pada SPSS menggunakan uji statistic *Cronbach's Alpha*. Data akan *reliable* apabila memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6. Berikut adalah paparan hasil dari uji realibilitas :

Tabel 4. 7
Uji Reabilitas Variabel Akuntabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	5

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Tabel 4. 8
Uji Reabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.630	6

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Tabel 4. 9
Uji Reabilitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.760	6

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai α dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,740, nilai α variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,630, dan nilai α variabel pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 0,760. Hasil *Cronbach Alpha* dari setiap variabel tersebut telah menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,6. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa **semua variabel dalam penelitian ini telah *reliable***.

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan terdistribusi normal jika memenuhi asumsi normalitas data yaitu jika nilai dari uji *Kolmogrov Smirnov* (KS) tidak signifikan pada ($p > 0,05$) dengan kata lain residual berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai dari uji *Kolmogrov Smirnov* signifikan

pada ($p < 0,05$) dengan kata lain residual berdistribusi tidak normal. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik :

Tabel 4. 10
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14560673
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.066
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 ^c

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Hasil uji *Kolmogorov Smirnov* diatas menunjukkan nilainya sebesar 0,078 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,133. Hal ini berarti membuktikan bahwa data residual telah terdistribusi dengan normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikansi harus lebih dari 0,05. Oleh karena itu, hasil uji ini telah konsistensi dengan uji sebelumnya.

4.1.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat toleransi variabel dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil dari Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4. 11
Uji *Multikolinearitas*

Coefficients^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.265	2.635		1.239	.218		
Akuntabilitas	.770	.071	.745	10.867	.000	.984	1.016
Partisipasi Masyarakat	.228	.097	.161	2.348	.021	.984	1.016

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh dari masing-masing variabel adalah $> 0,1$. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,984, dan variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,984. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus $> 0,1$.

Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah sebesar 1,016 untuk akuntabilitas, dan untuk partisipasi masyarakat sebesar 1,016. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji *multikolonieritas* ini bahwa nilai dari VIF harus < 10 . Sehingga, dapat diambil kesimpulan **bahwa tidak terjadi gejala *multikolonieritas* antar variabel independen dalam penelitian ini.**

4.1.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah uji yang muncul karena kesalahan atau residual dari model yang diuji tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi yang lain. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan menggunakan uji *Glesjer*. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian heteroskedastisitas :

Tabel 4. 12
Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.412	1.400		-1.009	.316
	Akuntabilitas	.074	.044	.169	1.692	.094
	Partisipasi Masyarakat	.033	.055	.061	.613	.541

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Pada tabel hasil uji *heteroskedastisitas* di atas, nilai signifikansi yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebesar 0,094 untuk variabel akuntabilitas, dan sebesar 0,541 untuk variabel partisipasi masyarakat. Nilai-nilai yang diperoleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dalam uji ini harus di atas 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung adanya *heteroskedastisitas*.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Perhitungan statistic dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program computer *SPSS for Windows* versi 22. Hasil dari pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 13
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.126	2.108		-.060	.952
	Akuntabilitas	.891	.057	.896	15.581	.000
	Partisipasi Masyarakat	.285	.076	.214	3.729	.000

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Dari tabel hasil pengolahan data diatas, diperoleh koefisien variabel bebas X1 (Akuntabilitas) sebesar 0,891, dan koefisien variabel bebas X2 (Partisipasi Masyarakat) adalah sebesar 0,285. Maka model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = - 0,126 + 0,891 X_1 + 0,285 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pemberdayaan Masyarakat

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Partisipasi Masyarakat

e = Standar error

Berdasarkan data diatas maka pengaruh tersebut terlihat dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

1. Nilai koefisien pada variabel akuntabilitas (X1) adalah sebesar 0,891.

Artinya jika terjadi kenaikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebesar 1%, maka pemberdayaan masyarakat akan meningkat sebesar 0,891%. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sebesar 1% maka pemberdayaan masyarakat juga akan mengalami penurunan sebesar 0,891%.

2. Nilai koefisien pada variabel partisipasi masyarakat (X2) adalah

sebesar 0,285. Nilai tersebut memiliki arti bahwa jika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pemberdayaan masyarakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,285%. Sebaliknya, jika terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebesar 1% maka pemberdayaan masyarakat akan mengalami penurunan sebesar 0,285%.

4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai

koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*. Hasil uji koefisien determinasi R^2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 14
Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 ^a	.785	.778	.782

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,778. Hal ini berarti 77,8% pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh variabel pengelolaan dana desa yang terdiri dari akuntabilitas (X1) dan partisipasi masyarakat (X2), sedangkan sisanya yaitu 22,2% (100% - 77,8% = 22,2%) pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

4.1.7.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) digunakan untuk menguji secara bersama-sama ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat diketahui dengan menggunakan uji F. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 15
Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.359	2	74.679	122.085	.000 ^b
	Residual	40.984	67	.612		
	Total	190.343	69			

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Dari hasil output tabel 4.15 diatas menunjukkan nilai F sebesar 122,085 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain bahwa akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

4.1.7.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual atau sering disebut sebagai uji t merupaka uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil dari uji t ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. 16
Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.126	2.108		
				-.060	.952

Akuntabilitas	.891	.057	.896	15.581	.000
Partisipasi Masyarakat	.285	.076	.214	3.729	.000

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020.

Dari hasil Uji Statistik t di atas yang menggunakan program SPSS, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Akuntabilitas

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat diterima. Dalam tabel tersebut nilai t hitung adalah sebesar 15,581 dan nilai t tabel adalah sebesar 1,660 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,00, dimana nilai signifikansinya tidak lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

2. Variabel Partisipasi Masyarakat

Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,729 dan nilai t tabel adalah 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana nilai signifikansi ini tidak lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

4.2 Hasil Penelitian

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperdalam pembahasan, melalui data tanggapan responden yang dapat diketahui dengan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Berdasarkan presentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Skor Aktual : Jumlah Skor Jawaban Responden

Skor Idela : Jumlah Skor Maksimum (Jumlah Responden \times 5)

Adapun tabel kriteria presentase skor tanggapan terhadap skor ideal yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 17
Kriteria Presentase Skor Tanggapan Terhadap Skor Ideal

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20,00 – 36,00	Tidak Baik
2	36,01 – 52,00	Kurang Baik
3	52,01 – 68,00	Cukup
4	68,01 – 84,00	Baik
5	84,02 – 100	Sangat Baik

Sumber : Narimawati (2007: 84-85)

4.2.1 Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Berikut ini merupakan deskripsi untuk mengetahui hasil penelitian terhadap 100 responden mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 4 indikator meliputi 4 pernyataan yang disebarakan kepada masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Tabel 4. 18
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas

No	Indikator	Pernyataan	Skor Tanggapan					Skor		%
			5	4	3	2	1	Aktual	Ideal	
1.	Tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.	Prioritas dan perhatian utama dalam pengalokasian dana desa adalah kepentingan publik dan golongan.	65	21	0	14	0	437	500	88%
2.	Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.	Masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban	59	41	0	0	0	459	500	92%

		penggunaan dana desa secara cepat dan tepat.								
3.	Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.	Masyarakat desa ikut terlibat dalam tahapan pengelolaan dana desa	64	36	0	0	0	464	500	93%
4.	Adanya pengawasan oleh tim pelaksana	Masyarakat desa merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.	82	18	0	0	0	482	500	97%
		Total						1842	2000	92%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan perhitungan diatas maka untuk mengetahui tanggapan responden terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{1842}{2000} \times 100 \%$$

$$= 92\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bernilai sebesar 92% hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut masuk kedalam kriteria sangat baik, artinya responden merasa pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab, serta mengutamakan kepentingan publik.

4.2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Berikut ini merupakan deskripsi untuk mengetahui hasil penelitian terhadap 100 responden mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 4 indikator meliputi 5 pernyataan yang disebarikan kepada masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Tabel 4. 19
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat

No	Indikator	Pernyataan	Skor Tanggapan					Skor		%
			5	4	3	2	1	Aktual	Ideal	
1.	Adanya pengawasan dari masyarakat.	Masyarakat desa merasa diberikan kebebasan untuk melaksanakan	3	50	47	0	0	356	500	71%

		pengawasan pengelolaan dana desa.								
2.	Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.	Masyarakat desa bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program dana desa.	64	27	9	0	0	455	500	91%
3.	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa.	Masyarakat desa merasa selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.	42	58	0	0	0	442	500	88%
4.	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.	Masyarakat desa merasa diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, saran, atau kritikan kepada	93	7	0	0	0	493	500	99%

		pengelola dana desa.								
		Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa.	44	56	0	0	0	444	500	89%
		Total						2190	2500	88%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan perhitungan diatas maka untuk mengetahui tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{2190}{2500} \times 100 \%$$

$$= 88\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka tanggapan responden mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa menunjukkan hasil sebesar 88% yang artinya hasil tersebut masuk kedalam kriteria sangat baik. Artinya responden merasa pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ini telah melibatkan dan mengikutsertakan masyarakatnya dalam proses pengelolaan dana desa, mendengarkan aspirasi, saran atau kritikan yang

diajukan oleh masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan program desa.

4.2.3 Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Berikut ini merupakan deskripsi untuk mengetahui hasil penelitian terhadap 100 responden mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 5 indikator meliputi 5 pernyataan yang disebarkan kepada masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Tabel 4. 20
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Pernyataan	Skor Tanggapan					Skor		%
			5	4	3	2	1	Aktual	Ideal	
1.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Masyarakat desa diperbolehkan memanfaatkan sumber daya dan lingkungan sebagai upaya mengurangi masyarakat miskin.	96	4	0	0	0	496	500	99%
2.	Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan	Masyarakat miskin di Desa Sukamaju mengembangka								

	yang dilakukan oleh penduduk miskin.	n usaha untuk meningkatkan pendapatan.	80	20	0	0	0	480	500	96%
3.	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya	Masyarakat desa menengah ke atas memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan saling membantu terhadap masyarakat miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.	78	22	0	0	0	478	500	96%
4.	Meningkatnya kemandirian kelompok	Masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan dana desa.	13	52	21	14	0	364	500	73%
5.	Meningkatnya kapasitas dan	Masyarakat Desa Sukamaju memiliki	27	73	0	0	0	427	500	85%

	pemerataan pendapatan	peningkatan dalam kapasitas dan pemerataan pendapatan.								
		Total						2245	2500	90%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

Berdasarkan perhitungan diatas maka untuk mengetahui tanggapan responden terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Skor Total} = \frac{2245}{2500} \times 100 \%$$

$$= 90\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai pemberdayaan masyarakat menunjukkan hasil sebesar 90% yang masuk kedalam kriteria sangat baik. Artinya responden merasa pelaksanaan pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik sehingga terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang baik, yaitu dengan berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya kemandirian masyarakat, dan dimanfaatkannya sumber daya yang dimiliki Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

4.3 Pembahasan

Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh akuntabilitas (X_1), dan partisipasi masyarakat (X_2), terhadap pemberdayaan masyarakat (Y),

maka peneliti telah melakukan penelitian tersebut dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”. Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 22, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

4.3.1 Gambaran Akuntabilitas (X_1), Partisipasi Masyarakat (X_2) dalam Pengelolaan Dana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat (Y) Pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut terhadap 100 orang responden dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner. Diketahui bahwa variabel akuntabilitas (X_1) yang dihasilkan dianggap sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan perhitungan yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki skor aktual sebesar 1842 dan skor ideal sebesar 2000 dengan nilai persentase jumlah rata-rata yang diperoleh sebesar 92%.

Dengan adanya hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator dalam variabel akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik, tetapi dalam indikator tersebut terdapat satu indikator dengan satu pernyataan yang memiliki jawaban terendah yaitu indikator tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun

anggaran, dengan pernyataan “Prioritas dan perhatian utama dalam pengalokasian dana desa adalah kepentingan publik dan golongan”, dalam indikator ini besarnya nilai skor aktual yaitu 437 dari skor ideal yaitu 500 (88%). Dengan adanya hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan publik dalam pengalokasian dana desa.

Pada variabel partisipasi masyarakat (X_2) menunjukkan hasil yang sangat baik, karena dalam perhitungan yang telah dilakukan partisipasi masyarakat memiliki nilai skor aktual sebesar 2190 dan skor ideal sebesar 2500 dengan nilai persentase jumlah rata-rata yang diperoleh sebesar 88%.

Dengan adanya hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator dalam variabel partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi dalam indikator tersebut terdapat satu indikator yang memiliki jawaban terendah yaitu indikator adanya pengawasan dari masyarakat, dengan pernyataan “Masyarakat desa merasa diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa”, dalam indikator ini besarnya nilai skor aktual yaitu 356 dari skor ideal yaitu 500 (71%). Dengan adanya hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa belum sepenuhnya diberikan kebebasan dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa.

Pada variabel pemberdayaan masyarakat (Y) menunjukkan hasil yang sangat baik, karena berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan pemberdayaan masyarakat memiliki nilai skor aktual sebesar 2245 dan

skor ideal sebesar 2500 dengan nilai persentase jumlah rata-rata yang diperoleh sebesar 90%.

Dengan adanya hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing indikator dalam variabel pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi dari indikator tersebut terdapat satu indikator yang memiliki jawaban terendah yaitu indikator meningkatnya kemandirian kelompok, dengan pernyataan “Masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan dana desa”, dalam indikator ini besarnya nilai skor aktual yaitu 364 dari skor ideal yaitu 500 (73%). Dengan adanya hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa belum sepenuhnya mandiri dan masih bergantung kepada bantuan dana desa.

4.3.2 Pengaruh Akuntabilitas (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_2) dalam Pengelolaan Dana Desa Secara Parsial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) Pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

4.3.2.1 Pengaruh Akuntabilitas (X_1) Dalam Pengelolaan Dana Desa Secara Parsial Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil ini diperkuat dengan banyaknya jawaban sangat setuju dan setuju dari responden. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas dilakukan oleh pemerintah desa dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, selain itu pemerintah desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk bisa mengakses dan mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dengan mudah. Upaya tersebut dilakukan pemerintah desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan desa, dan sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil kuesioner jawaban responden yang menjawab pernyataan mengenai mudahnya masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban yang bernilai sebesar 92%, yang artinya masyarakat di Desa Sukamaju ini bisa mengakses laporan tanggungjawab pengelolaan dana desa dengan mudah.

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban ini masyarakat diharapkan dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa berjalan, sehingga nantinya pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dari adanya dana desa dapat terlaksana.

Selain itu berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil nilai t hitung sebesar 15,581 dan nilai t tabel sebesar 1,660. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel. Selain itu, nilai signifikansi dalam variabel ini adalah sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi dari suatu variabel tidak boleh lebih dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Hasil dari penelitian dalam variabel akuntabilitas ini juga mendukung penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rina Indrawati Syafi'I dkk pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu menurut Weny Ultafiah (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Menurut Rizky Amalia Sugista

(2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel akuntabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Menurut Fitri Sukmawati (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

4.3.2.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X₂) dalam Pengelolaan Dana Desa Secara Parsial terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil analisis dan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan, mengingat tujuan dari adanya dana desa ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang dimana salah satu upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Sehingga, partisipasi masyarakat ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih mandiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa memiliki pengaruh secara langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya

jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan setuju dalam kuesioner.

Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan mendorong timbulnya hubungan yang baik antara masyarakat desa dan pemerintah desa, karena dengan adanya hal tersebut akan menjadikan pemerintah desa lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Bentuk dari upaya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini adalah dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan program dana desa, diikutsertakannya masyarakat dalam pengambilan keputusan program-program desa, dan masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran kepada pengelola dana desa.

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil kuesioner jawaban responden mengenai pernyataan masyarakat yang merasa selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa yang menunjukkan hasil sebesar 88%, selain itu jawaban responden mengenai masyarakat yang diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, saran, serta kritikan kepada pengelola dana desa menunjukkan hasil sebesar 99%, dan jawaban responden mengenai pernyataan masyarakat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan program-program desa menunjukkan hasil sebesar 89%. Dari hasil kuesioner ini dapat dilihat bahwa selama

ini masyarakat di Desa Sukamaju selalu dilibatkan dalam pengelolaan dana desa, dengan dilibatkannya masyarakat disini maka pemberdayaan masyarakatpun akan terlaksana.

Hasil dari penelitian ini dikuatkan dengan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,729 dan nilai t tabel adalah 1,660. Perhitungan tersebut telah memenuhi bahwa nilai t hitung harus lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel. Selain itu, nilai signifikansi dari variabel partisipasi masyarakat ini sebesar 0,000. Dimana nilai ini juga telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Sehingga, dari hasil uji hipotesis tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat apabila pengelolaan dana desa dikelola dengan berhasil dan baik maka pemberdayaan masyarakat pun bisa terlaksana. Menurut Ribka Lombogia, Joorie M. Ruru, Novva N. Plangiten (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan pembangunan didesa,

pembangunan desa merupakan salah satu upaya adanya pemberdayaan masyarakat. Menurut I Made Yoga Darma Putra dan Ni Ketut Rasmini (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Menurut Ray Septianis Kartika (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat ikut berkontribusi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4.3.3 Pengaruh Akuntabilitas (X_1), dan Partisipasi Masyarakat (X_2) dalam Pengelolaan Dana Desa secara Simultan terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y) pada Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_2) dalam pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian dalam hal akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukamaju telah akuntabel, yaitu dengan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dimana masyarakat bisa dengan mudah mengakses laporan pertanggungjawaban tersebut, hal ini merupakan upaya pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat mengenai keuangan desa. Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut membuat pemberdayaan masyarakat bisa terlaksana, karena dengan adanya pengelolaan dana desa yang

dilaksanakan dengan baik, tanggungjawab, dan berfokus pada kepentingan publik maka masyarakat dapat merasakan manfaat dari dana desa tersebut sehingga dapat digunakan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki.

Hasil penelitian pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa ditunjukkan dengan diberikannya kebebasan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, diikutsertakannya masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan dana desa, selain itu masyarakat juga diberikan kebebasan dalam menyampaikan kritik maupun saran kepada pengelola dana desa. Dengan adanya upaya ini pemberdayaan masyarakat bisa tercipta karena masyarakat ikut terlibat dalam proses pengelolaan dana desa sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan adanya dana desa yang bisa digunakan dalam upaya memandirikan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut secara keseluruhan sudah baik hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden mengenai akuntabilitas yang menunjukkan hasil sebesar 92% yang artinya masuk kedalam kriteria baik. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut secara keseluruhan sudah baik hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden mengenai partisipasi masyarakat yang menunjukkan hasil sebesar 88% yang artinya masuk kedalam kriteria baik. Pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut secara keseluruhan sudah baik hal ini ditunjukkan dengan jawaban responden mengenai pemberdayaan masyarakat yang menunjukkan hasil sebesar 90% yang artinya masuk kedalam kriteria yang baik.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_2) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y) secara parsial. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t

hitung dalam variabel akuntabilitas lebih besar dari pada t tabel yaitu sebesar $15,581 > 1,660$ selain itu nilai signifikansi dalam variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,000 yang dimana nilai tersebut telah memenuhi syarat karena tidak lebih dari 0,05. Sama halnya dengan t hitung dalam variabel partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar $3,729 > 1,660$ dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana telah memenuhi syarat karena tidak lebih dari 0,05.

3. Hasil uji hipotesis membuktikan secara simultan bahwa variabel Akuntabilitas (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_2) dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Y). Hal ini ditunjukkan dari hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu bernilai $122,085 > 3,09$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Dengan kata lain akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Dari uji F juga diketahui bahwa nilai signifikansi yang muncul adalah 0,000 yang berarti $F_{sig} (0,000 < 0,05)$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan subjek yang sama agar bisa menjadi pembanding dan variabel dalam penelitian ini dapat lebih

diperluas, sehingga pembahasan dalam penelitian tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan dana desa, akan tetapi seluruh pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi pemerintah desa diharapkan bisa lebih memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan publik atau masyarakat dalam pengelolaan dana desa, selain itu pemerintah desa juga diharapkan bisa lebih memberikan kebebasan kepada masyarakat desa untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
3. Bagi masyarakat diharapkan bisa lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan tidak bergantung kepada bantuan dana desa, selain itu masyarakat juga diharapkan bisa selalu mengawasi pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P. (2019, November). *Kasus Dana Desa Fiktif Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah*. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/kasus-dana-desa-fiktif-merupakan-tanggung-jawab-pemerintah-elk5>
- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro KEcamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Cornelius Herdita Aries Permana, D. P. (2016). SKRIPSI. *Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat*, 5.
- Fadil, I. (2019, Oktober). *Tilep Dana Desa Rp 414 Juta, Kades di Garut Jadi Tersangka*. Diambil kembali dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/tilep-dana-desa-rp-414-juta-kades-di-garut-jadi-tersangka.html>.
- Fercanza, V. (2016). SKRIPSI. *Pengaruh Current Ratio, Total Debt to Total Assets dan Sales Growth terhadap Net Profit Margin Pada Perusahaan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013*, 8.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: BAdang Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, K. K. (2019, Januari). *Hasil Dana Desa Sejak 2015*. Diambil kembali dari kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-hasil-dana-desa-sejak-2015/>.
- Jufri. (2018, Agustus). *Banyak Desa di Agara Belum Pasang Baliho Realisasi ADD 2018*. Diambil kembali dari Beritakini.co: <https://beritakini.co/news/banyak-desa-di-agara-belum-pasang-baliho-realisasi-add-2018/index.html>.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- M.A, M. A. (2017). SKRIPSI . *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.*
- Made Heny Urmila Dewi, C. F. (2013). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali.* 132.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi.* Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Novellno, A. (2019, November). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat.* Diambil kembali dari CNN Indonesia: [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat)
- Padangaran, A. M. (2011). *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat.* Kendari: Unhalu Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.* (2018). Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.* (2014). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.* (2014). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarmanu. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Surabaya: Airlangga University Perss.

- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Prenadameia Group.
- Solekhan. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2019*. (n.d.).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Totok Mardikanto, P. S. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
- Uma Sekaran, R. B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2014). Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Wedhaswary, I. D. (2014, Mei). "Nawa Cita" 9 Agenda Prioritas Jokowi - JK. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agen.da.Prioritas.Jokowi-JK>.

Lampiran 1
Formulir Pengajuan Skripsi

**FORMULIR PENGAJUAN PENULISAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

NAMA : YOSHI FAZA NUR S
NPM : C10160061

AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK

JUDUL SKRIPSI YANG DIAJUKAN :

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT


SARAN DAN MASUKAN DARI DOSEN PEMBIMBING KONSENTRASI:

.....
.....
.....
.....



JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI PEMBIMBING KONSENTRASI:

Menyetujui,
Dosen Konsultasi Konsentrasi


(Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.)

Bandung, 06 Maret 2020

Ketua Program Studi S1 Akuntansi ,



(Dwi Puryati, SE., M.Si. Ak, CA.)

Yang Mengajukan,



(Yoshi Faza Nur Shadrina)

EKUITAS-PsM-F-AKTS1.02 Rev.00

Lampiran 2
Surat Permohonan Penelitian



YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PT. BANK JABAR BANTEN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI EKUITAS

MAGISTER MANAJEMEN (S2) TERAKREDITASI B NO. 1583/SK/BAN-PT/AKred/M/V/2017
MANAJEMEN (S1) TERAKREDITASI B NO. 4025/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019
S1 AKUNTANSI (S1) TERAKREDITASI A NO. 5100/SK/BAN-PT/AKred/S/XII/2017
PERBANKAN DAN KEUANGAN (D3) TERAKREDITASI A NO. 1454/SK/BAN-PT/AKred/Dipl-III/VIII/2016
AKUNTANSI (D3) TERAKREDITASI A NO. 1607/SK/BAN-PT/AKred/Dipl-III/VIII/2016

Kampus : Jl. PHH. Mustopa No. 31 Bandung 40124 Telp. 02270778332 Fax. 0227204597
Website : <http://ekuitas.ac.id>

Nomor : 009/EKUITAS-PDP/S1-AK/B.1-2/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth,
Kadar Solihat, Pimpinan
Jln Raya Garut - Tasik KM 14 Desa Sukamaju
Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Kode
Pos 44181

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penyusunan Skripsi, dengan ini kami mohon kiranya Bapak/ Ibu memberi ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin

Adapun data mahasiswa kami adalah :

Nama / NPM : YOSHI FAZA NUR SHADRINA / C10160061
No. Kontak : 087823327998
Konsentrasi :
Program Studi : S1 - S1 AKUNTANSI
Tahun Akademik : 2019/2020 Genap
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Perlu kami sampaikan bahwa data hasil penelitian yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan akademik dengan menjaga etika dan kaidah keilmuan.

Demikian surat permohonan ini kami, atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Kota Bandung, 28 Juni 2020
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI - S1
STIE EKUITAS BANDUNG
Ketua Program Studi

Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.



Lampiran 3

Surat Keputusan Pembimbing

DAFTAR PEMBIMBING PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Lampiran SK No :

No	NIM / Nama Mahasiswa	Judul Tugas Akhir / Skripsi	Pembimbing
1	C10150082 REZA SYIFA TAMAMIL MUKHTAR	Pengaruh Lingkup Audit dan Independensi terhadap Opini Audit	Faiz Said Bachmid, SE., M.Ak., Ak., CA.
2	C10150113 JULIAN KRISPANA	pengaruh kualitas pelayanan pajak , penerapan pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (study kasus pada kantor SAMSAT pelajaran bandung)	LILIS SAIDAH NAPISAH, SE.,MM.,M.Ak
3	C10160003 ZIADAH TAWAKALINI	PENGARUH KONSISTENSI DAN ADAPTASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGAJUAN KARYAWAN YANG TERKOMPUTERISASI PADA PT. TASPEN (PERSERO) KCU BANDUNG.	Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si.
4	C10160010 BUSTOMI ARTHA DANAR	Pengaruh Pengembangan Sistem dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepuasan Pengguna Uang Elektronik OVO	Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si.
5	C10160016 MILLA YULLANA	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Dr. D. Etynda Kasim, SE.,M.Si.,Ak., SE.,MSi.,Ak.,CA.,CSP
6	C10160032 GHINA RAHMALIA	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Lina Said, SE., MSi., Ak., CA, SE, M.Si., Ak., CA
7	C10160048 REZA KARLINA	PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung)	LILIS SAIDAH NAPISAH, SE.,MM.,M.Ak
8	C10160055 RIANA FUJI DWIPUTRI SOLAHUDIN	Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi dan Partisipasi Manajemen Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi	Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.
9	C10160057 SYIFA AZZAHRAH	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi dan Pelatihan Pegawai Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi	Yane Devi Anna, SE., M.Si., Ak, CA
10	C10160061 YOSHI FAZA NUR SHADRINA	Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.
11	C10160071 DHEA ADELIA	Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Jasa Subsektor Informasi dan Telekomunikasi Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018	Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.

Lampiran 4
Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)”. Oleh karena itu disela-sela kesibukan Anda, kami memohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terimakasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian

1. Berilah jawaban yang benar sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Saudara(i) dengan memberikan tanda (√) pada kolom.
2. Pada masing-masing pernyataan, terdapat lima alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut :
 - a. SS : Sangat Setuju : 5
 - b. S : Setuju : 4
 - c. N : Netral : 3
 - d. TS : Tidak Setuju : 2
 - e. STS : Sangat Tidak Setuju : 1

1. Akuntabilitas

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat desa ikut terlibat dalam tahapan pengelolaan dana desa.					
2.	Prioritas dan perhatian utama dalam pengalokasian dana desa adalah kepentingan publik dan golongan.					
3.	Masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan rincian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara cepat dan tepat.					
4.	Masyarakat desa merasa pengelolaan dana desa telah diawasi dengan baik oleh tim pelaksana.					

2. Partisipasi Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat desa merasa diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa.					
2.	Masyarakat desa bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program dana desa.					

3.	Masyarakat desa merasa masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.					
4.	Masyarakat desa merasa diberi kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, saran, atau kritikan kepada pengelola dana desa.					
5.	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa.					

3. Pemberdayaan Masyarakat

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat desa diperbolehkan memanfaatkan sumber daya dan lingkungan sebagai upaya mengurangi masyarakat miskin.					
2.	Masyarakat miskin di Desa Sukamaju mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan.					
3.	Masyarakat desa menengah ke atas memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dan saling membantu terhadap					

	masyarakat miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.					
4.	Masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan dana desa.					
5.	Masyarakat Desa Sukamaju memiliki peningkatan dalam kapasitas dan pemerataan pendapatan.					

Lampiran 5

Jawaban Responden

No Responden	AKUNTABILITAS (X1)				PARTISIPASI MASYARAKAT (X2)					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (X3)				
	A.1	A.2	A.3	A.4	PM.1	PM.2	PM.3	PM.4	PM.5	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
1	5	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4	4
2	5	5	4	5	3	5	4	5	4	5	5	5	3	5
3	5	5	5	5	3	3	4	5	4	5	5	5	4	4
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4
6	5	5	4	5	3	3	5	5	4	5	5	5	3	4
7	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
8	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4
9	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
10	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5
11	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
12	4	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	4
13	5	5	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	4	4
14	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4
15	5	4	5	5	3	4	4	5	4	5	5	5	4	4
16	5	5	5	5	3	5	4	4	4	5	5	5	4	4
17	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4
18	4	4	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4
19	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	3	4
20	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5
21	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5
22	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	3	4
23	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5
24	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	4	4
25	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
26	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
27	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
28	4	2	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
29	4	2	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	2	4
30	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
31	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5
32	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
33	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4
34	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
35	5	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	3	4
36	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4
37	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
38	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	4	4
39	5	5	4	5	3	4	4	5	4	5	5	5	3	5
40	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	4
41	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5
42	4	2	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	2	4
43	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
44	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
45	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	4
46	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
47	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	5	4	4	4
48	4	2	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
49	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
50	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4

51	5	5	4	5	3	4	4	5	4	5	5	5	3	5
52	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	4	4
53	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
54	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4
55	5	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	3	4
56	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
57	5	5	5	5	3	4	4	5	4	5	4	5	4	4
58	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5
59	5	5	5	5	4	3	5	5	4	5	5	5	3	4
60	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5
61	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5
62	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	3	4
63	4	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
64	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4
65	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4
66	5	4	5	5	3	4	4	5	4	5	5	5	4	4
67	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
68	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4
69	4	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	4
70	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
71	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	3	4
72	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
73	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
74	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	3	4
75	5	5	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	3	4
76	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
77	5	4	5	5	3	4	4	5	4	5	5	5	4	4
78	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4
79	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
80	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5
81	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	4	4
82	5	5	4	5	3	4	4	5	4	5	5	5	3	5
83	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4
84	4	5	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	4	4
85	5	5	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	4	4
86	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
87	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4
88	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	5	5	3	4
89	4	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
90	5	4	5	4	5	3	5	5	4	5	5	5	3	5
91	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5
92	4	2	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
93	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	3	4
94	5	5	5	5	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5
95	5	5	5	5	3	5	4	5	4	5	4	5	4	4
96	4	2	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4
97	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4
98	4	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4
99	5	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	4
100	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5

Lampiran 6
Hasil Output SPSS

Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

	A.1	A.2	A.3	A.4	TOTAL
A.1 Pearson Correlation	1	.529**	.307**	.299**	.790**
Sig. (2-tailed)		.000	.002	.002	.000
N	100	100	100	100	100
A.2 Pearson Correlation	.529**	1	.298**	-.109	.851**
Sig. (2-tailed)	.000		.003	.280	.000
N	100	100	100	100	100
A.3 Pearson Correlation	.307**	.298**	1	-.020	.574**
Sig. (2-tailed)	.002	.003		.843	.000
N	100	100	100	100	100
A.4 Pearson Correlation	.299**	-.109	-.020	1	.247*
Sig. (2-tailed)	.002	.280	.843		.013
N	100	100	100	100	100
TO Pearson Correlation	.790**	.851**	.574**	.247*	1
TAL Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.013	
N	100	100	100	100	100

Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

	PM.1	PM.2	PM.3	PM.4	PM.5	TOTAL
PM.1 Pearson Correlation	1	.033	.127	-.006	.013	.538**
Sig. (2-tailed)		.743	.207	.955	.897	.000
N	100	100	100	100	100	100
PM.2 Pearson Correlation	.033	1	-.158	.111	.055	.544**
Sig. (2-tailed)	.743		.116	.272	.584	.000
N	100	100	100	100	100	100
PM.3 Pearson Correlation	.127	-.158	1	.154	.062	.444**
Sig. (2-tailed)	.207	.116		.126	.540	.000
N	100	100	100	100	100	100
PM.4 Pearson Correlation	-.006	.111	.154	1	.006	.338**
Sig. (2-tailed)	.955	.272	.126		.950	.001
N	100	100	100	100	100	100
PM.5 Pearson Correlation	.013	.055	.062	.006	1	.478**

	Sig. (2-tailed)	.897	.584	.540	.950		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOT	Pearson Correlation	.538**	.544**	.444**	.338**	.478**	1
AL	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL
Y.1	Pearson Correlation	1	-.102	.384**	-.084	.124	.175
	Sig. (2-tailed)		.312	.000	.408	.218	.082
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	-.102	1	.579**	.592**	.135	.709**
	Sig. (2-tailed)	.312		.000	.000	.180	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.384**	.579**	1	.552**	.323**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	-.084	.592**	.552**	1	.403**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.408	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.124	.135	.323**	.403**	1	.597**
	Sig. (2-tailed)	.218	.180	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL	Pearson Correlation	.175	.709**	.797**	.889**	.597**	1
	Sig. (2-tailed)	.082	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

Uji Realibilitas Variabel Akuntabilitas

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.740	5

Uji Realibilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Cronbach's Alpha	N of Items
.630	6

Uji Realibilitas Variabel Pemberdayaan Masyarakat

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	6

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14560673
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.066
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 ^c

Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.265	2.635		1.239	.218		
	Akuntabilitas	.770	.071	.745	10.867	.000	.984	1.016
	Partisipasi Masyarakat	.228	.097	.161	2.348	.021	.984	1.016

Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.412	1.400		-1.009	.316
	Akuntabilitas	.074	.044	.169	1.692	.094
	Partisipasi Masyarakat	.033	.055	.061	.613	.541

Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.126	2.108		-.060	.952
	Akuntabilitas	.891	.057	.896	15.581	.000
	Partisipasi Masyarakat	.285	.076	.214	3.729	.000

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 ^a	.785	.778	.782

Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.359	2	74.679	122.085	.000 ^b
	Residual	40.984	67	.612		
	Total	190.343	69			

Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.126	2.108		-.060	.952
	Akuntabilitas	.891	.057	.896	15.581	.000
	Partisipasi Masyarakat	.285	.076	.214	3.729	.000

CV

Curriculum Vitae

YOSHI FAZA NUR S

Jl. AH Nasution Gg.Karamat RT/RW 04/01

No.1 Cicaheum, Bandung 40282

087823327998



Data Diri

Nama Lengkap : Yoshi Faza Nur Shadrina
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 16 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : O
Alamat : Jl. AH Nasution Gg.Karamat RT/RW 04/01 No.1 Cicaheum, Bandung 40282
No. Telp : 087823327998
E-mail : yoshifn16@gmail.com
Agama : Islam
Hobi : Membuat Kue & Memasak
Status : Belum Menikah

Pendidikan

2004 -2010 : SD Negeri 1 Cicaheum, Bandung
2010 - 2013 : SMP Negeri 22 Bandung
2013 – 2016 : SMA PGII 1 Bandung
2016 - 2020 : STIE Ekuitas Bandung (S1 Akuntansi)